BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/18/KPTS/03/2023

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUSTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat dilakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/18 /KPTS/03/2023
TANGGAL: 2 Januari 2023

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1	Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja Fm	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	
4	Santunan Kematian bagi Masyarakat	Dinas Sosial
5	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kebutuhan Pokok	
6	Pedoman Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
7	Pedoman Pelaksanaan Pembubaran Koperasi di Pemerintah Daerah	
8	Kebijakan Industri Daerah	
9	Pengelolaan Lamban Kemasan	
10	Perubahan Perbup Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, Pelataran, Los Kios dan Pertokoan/Rumah Toko Milik Pemerintah Daerah	
11	Pedoman Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
13	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	
14	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	
15	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	
16	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	
17	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	
18	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	

19	Pembagian Alokasi Dana Pekon setiap Pekon Tahun Anggaran 2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
20	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2022	
21	Pedoman Pemilihan Peratin	
22	Pedoman Pelatihan Masyarakat dan aparatur Pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon	
23	Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Pekon	
24	Badan Usaha Milik Pekon	
25	Standar Satuan Harga Pekon	
26	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penangulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Pedoman Pembentukan Pekon Penanggulangan Bencana	
28	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan
29	Pedoman Teknis Audit Kinerja Berbasis Risiko	Inspektorat
30	Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit dengan Tujuan Tertentu Serta Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	
31	Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32	Pemberian Bantuan insentif bagi guru non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS dilingkungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan
33	Beasiswa Pendidikan Kesenian	
34	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata	
35	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar	Dinas Kesehatan
36	Perubahan Besaran Tarif Retribusai Izin Usaha Perikanan	Dinas Perikanan
37	Perubahan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
38	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan	Bagian Organisasi

40	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah	
41	Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
42	Kode Etik Dilingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
43	Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Bagian Tata Pemerintahan
44	Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN